

RENCANA STRATEGIS
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2021-2026



DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita penjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkenaan dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan dapat selesai dengan baik. Renstra Dinas Perikanan merupakan salah satu dokumen perencanaan manajemen operasional dalam meningkatkan kinerja instansi sesuai aspek-aspek *Good Governance* dalam membangun citra pemerintahan yang baik di mata masyarakat.

Rencana strategis Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-una merupakan dokumen perencanaan Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-una yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-una berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Pedoman ini sekaligus merupakan wujud nyata dukungan Dinas Perikanan sesuai tugas dan fungsinya dalam pencapaian Visi dan Misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati.

Pada kesempatan ini, saya selaku pimpinan Dinas Perikanan menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang memberikan kepercayaan kepada kami bersama-sama staf yang ada untuk meningkatkan kinerja. Kepada seluruh staf dan tim penyusun, saya sangat menghargai dedikasi yang telah diberikan demi mewujudkan apa yang telah kita sepakati bersama.

Ampana, November 2021

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Tojo Una Una



RAHMAT BASRI, S.Pi., M.Si
Pembina Muda, IV/c
NIP.19690902 199903 1 007



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar.....	iv
Bab. I Pendahuluan	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-5
1.3. Maksud dan Tujuan	I-9
1.4. Sistematika Penulisan	I-10
Bab. II Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II-1
2.2. Sumber Daya Dinas Perikanan	II-5
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan	II-7
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Perikanan	II-10
Bab. III Permasalahan dan Isu-isu Strategis	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III-3
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah	III-7
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	III-10
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	III-14
Bab. IV Tujuan dan Sasaran	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	IV-1
Bab. V Strategi dan Arah Kebijakan	V-1
5.1 Strategi dan Kebijakan	V-1
Bab. VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....	VI-1
6.1 Urusan Perikanan	VI-1
Bab. VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	VII-1
Bab. VIII Penutup	VIII-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tingkat Pendidikan Pegawai	II-5
Tabel 2.2	Kualifikasi Pegawai.....	II-6
Tabel 2.3	Jabatan dan Jumlah Pegawai.....	II-6
Tabel 2.4	Keadaan Aset Dinas Perikanan Kab. Tojo Una-una..	II-6
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una	II-8
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-una	II-9
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una Periode 2021-2026	III-1
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-6
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi/Kabupaten/ Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	III-7
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	III-11
Tabel 3.5	Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah.....	III-13
Tabel 3.6	Penentuan Isus-isu Strategis.....	III-14
Tabel 4.1	Perumusan Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Visi, Misi.....	IV-2
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-una	IV-3
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan.....	V-1
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una Periode 2021-2026	VI-4
Tabel 7.1	Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-1



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan antar dokumen RPJMD, Renstra K/L dan Renstra OPD Kabupaten Tojo Una-Una.....	I-4
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-una	II-3



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah adalah proses merubah kondisi daerah menjadi lebih baik dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Langkah awal pembangunan daerah dimulai dengan melakukan perencanaan. Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih telah dilantik, maka disusunnya Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tojo



Una-Una Tahun 2021-2026 yang tahapannya telah diatur secara sistimatis yang kemudian dirumuskan menjadi Dokumen RPJMD melalui penetapan peraturan daerah.

Terkait dengan hal tersebut diatas, Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode

5 (lima) tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Renstra perangkat daerah berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan permasalahan yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana strategis ini disusun melalui proses analisis dari hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai selama ini termasuk ketersediaan sumberdaya kelautan dan perikanan dan sumberdaya manusia sebagai pelaksana pembangunan, sehingga dapat diketahui permasalahan dan tantangan yang dinilai dapat menghambat pelaksanaan pembangunan sektor perikanan. Dalam proses penyusunan renstra, perangkat daerah melibatkan pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsi serta berkordinasi dengan Badan Perencanaan pembangunan, penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Tojo Una Una.

Penyusunan Renstra perangkat daerah juga memiliki keterkaitan dengan Renstra yang telah dikeluarkan oleh Provinsi/ K/L dalam hal ini Dinas kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi tengah , Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI dan menjadi dasar PD dalam menyusun rencana kerjanya selama 5 (lima) tahun, dengan menyelaraskan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis Dinas kelautan dan perikanan Propinsi Sulawesi tengah dan KKP RI untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Renstra OPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang nantinya dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Fungsi dibuatnya Renstra OPD adalah untuk menjabarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Tojo Una-



Una Tahun 2021 - 2026. Selanjutnya Renstra OPD menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Renja OPD dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

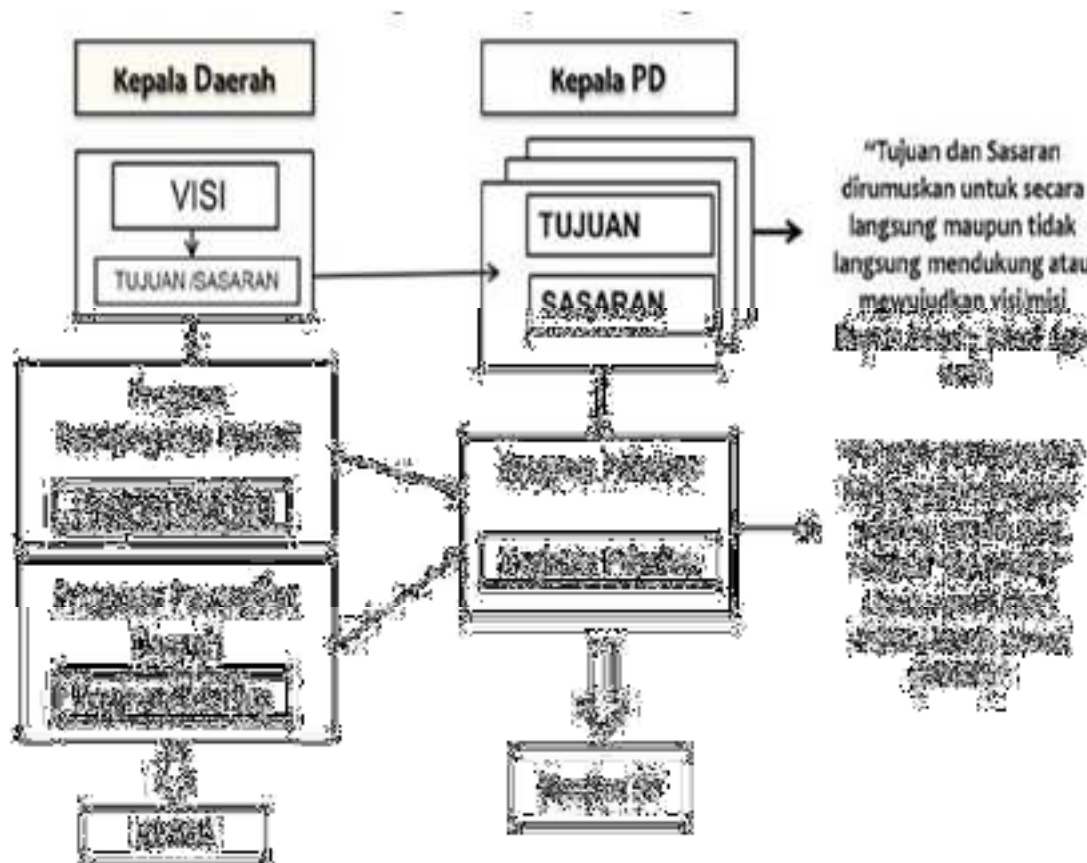
Rencana Strategis OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan merupakan dokumen perencanaan yang berlaku 5 (lima) tahun dan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJM Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif. Perumusan rancangan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026, merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan akhir RPJMD. Oleh karena itu, penyelarasan dan konsolidasi data dan informasi strategis yang dimuat didalam renstra ini sejalan dengan dokumen RPJMD kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026.

Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD Tojo Una Una 2021-2026, Renstra K/L dan Renja OPD

Renstra Perikanan Tahun 2021-2026 akan menjabarkan secara komprehensif yang memuat, Tujuan, Sasaran dan Strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun ke depan yang mengacu RPJMD dimana telah ditetapkannya prioritas daerah sebagai acuan didalam menyusun program dan kegiatan yang sejalan dengan RPJMD, adapun prioritas Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 sebanyak 5 (lima) prioritas pencapaian Visi Misi yaitu Visi Terwujudnya Kabupaten Tojo Una Una Tangguh, Maju dan Sejahtera, Misi (1) *Mewujudkan masyarakat yang terentaskan dari kemiskinan, tangguh bencana, dan lingkungan berkelanjutan,* (2) *Mewujudkan pemabngunan infratraktur wilayah yang maju dan keluar dari daerah tertinggal,* (3) *Memantapkan trisula pembangunan ekonomi bertumpu pada sektor pertanian, perikanan-kelautan, dan pariwisata yang berkelanjutan,* (4) *Meningkatkan sumberdaya Manusia berdaya saing bertumpu pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang berkeadilan,* (5) *Mewujudkan aparatur dan system pemerintahan daerah yang professional untuk meningkatkan kualitas pelayanan public berbasis smart governance.*

RPJMD Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati terpilih memuat sasaran dan strategi pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun masa pemerintahan. Untuk menjabarkan serta mewujudkan amanat pembangunan jangka menengah, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat menjadi acuan bagi OPD untuk mendukung pencapaian program prioritas Bupati tersebut, dokumen rencana tersebut adalah Rencana Strategis OPD yang memuat , tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan OPD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 .

Keterkaitan antar dokumen RPJMD dan renstra OPD dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1.1.
Keterkaitan antar dokumen RPJMD, Renstra K/L dan Renstra OPD
Kabupaten Tojo Una-Una

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan **Rencana Strategis Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2021 - 2026** adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
13. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia



- Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 365);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan



- Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 794);
 27. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 Tentang Hasil Pemutahiran dan Validasi Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 28. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ/2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020;
 29. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Korupsi Terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.
 30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Povinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Tataruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Sulawesi Tengah 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 4);



34. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2012 Nomor 8);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2013 Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 Nomor 2);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 adalah:

1. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran staf Dinas Perikanan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
2. Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 adalah :

1. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perikanan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur sejalan dengan RPJMD
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perikanan dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun;



3. Sebagai penjabaran visi, misi, kebijakan dan program daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan profesional berdasarkan indikator kinerja.
4. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan; berisi tentang latar belakang, Landasan Hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;
- Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah; berisi tentang Tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat Daerah, sumberdaya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perikanan;
- Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Perikanan; menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, Penentuan isu – isu strategis;
- Bab IV Tujuan dan Sasaran; menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan selama 5 (lima) tahun ke depan;
- Bab V Strategi dan arah kebijakan ; menguraikan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas perikanan dalam lima tahu mendatang;
- Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan; berisi tentang uraian rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;



Bab VII Kinerja penyelenggaraan bidang urusan ; menguraikan tentang indikator kinerja Dinas Perikanan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;

Bab VIII Penutup.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Struktur Organisasi

Dinas Perikanan dibentuk sesuai Keputusan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una Una nomor : 14 Tahun 2017 tentang perubahan atas PERDA Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Tojo Una Una dan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Kabupaten Tojo Una Una.

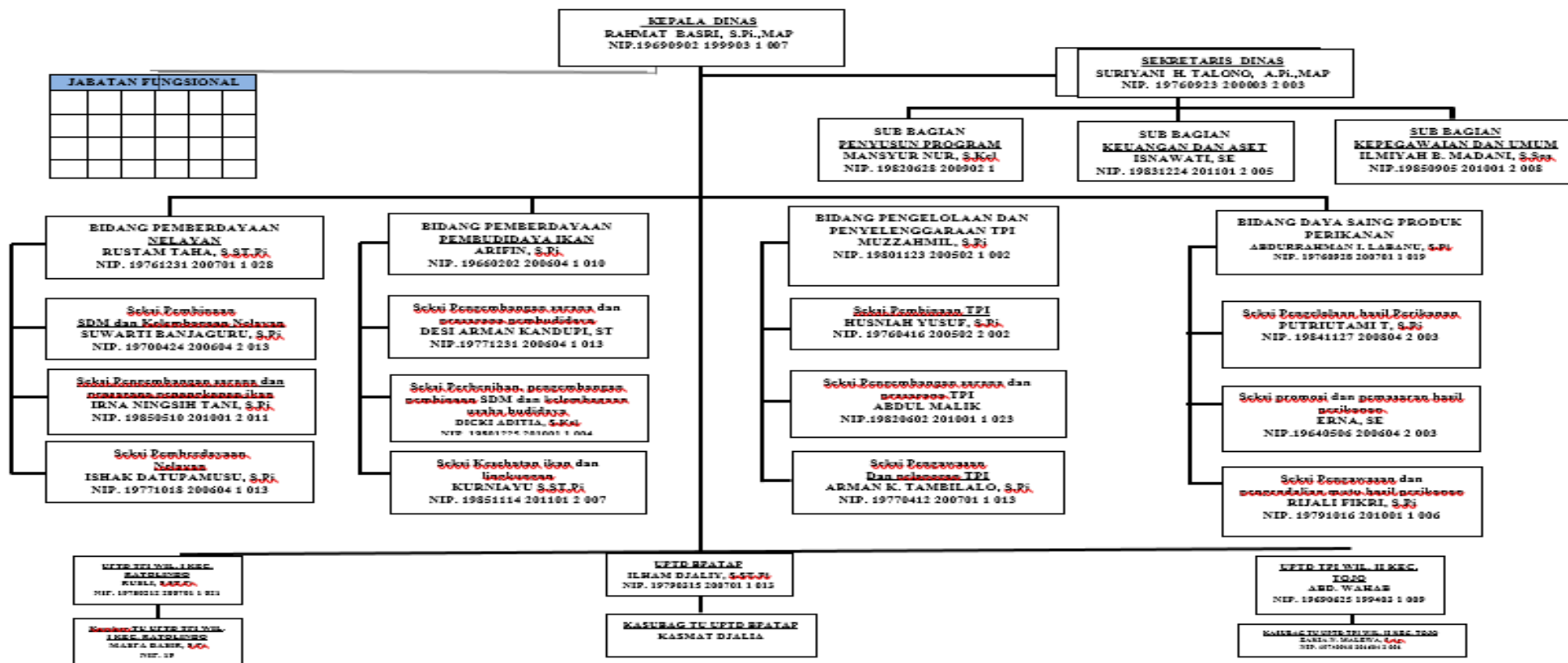
Struktur organisasi Dinas Perikanan terdiri dari seorang Kepala Dinas, seorang Sekretaris, 4 Kepala Bidang dan 15 Kepala Sub Bagian/Seksi, 3 Kepala UPTD serta 3 KTU UPTD adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Penyusun Program
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang Pemberdayaan Nelayan membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan Nelayan
 2. Seksi Pembinaan SDM Nelayan dan kelembagaan nelayan
 3. Seksi Pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan
- d. Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan :
 1. Seksi Pengembangan sarana dan prasarana pembudidaya
 2. Seksi Perbenihan, pengembangan pembinaan SDM dan kelembagaan usaha budidaya
 3. Seksi Kesehatan ikan dan Lingkungan
- e. Bidang Pengelolaan dan penyelenggaraan TPI membawahi :
 1. Seksi Pembinaan TPI
 2. Seksi Pengembangan sarana dan prasarana TPI
 3. Seksi Pengawasan dan pelaporan TPI
- f. Bidang Daya saing produk perikanan membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Hasil Perikanan



2. Seksi Promosi dan pemasaran hasil perikanan
 3. Seksi Pengawasan dan pengendalian mutu hasil perikanan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TOJO UNA UNA**



Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una



Tugas dan Fungsi

Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Tojo Una Una. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja dan kebijakan teknis dibidang perikanan;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dan pelaksanaan tugas dibidang perikanan;
- c. membina bawahan dilingkungan dinas perikanan dan membimbing secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan dinas perikanan sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. merumusan kebijakan teknis pelaksanaan standarisasi dan kompetensi jabatan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan sosialisasi pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan standarisasi dan kompetensi jabatan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar terdapat kesamaan persepsi dan komitmen;
- g. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- h. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;



- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan dinas perikanan dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas di lingkungan dinas perikanan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan di bidang perikanan baik secara lisan maupun tertulis.

2.2 Sumberdaya Dinas Perikanan

Kondisi Sumberdaya Manusia (SDM) khususnya yang berkaitan dengan keadaan Pegawai pada Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una adalah sebagai berikut :

Kondisi Kepegawaian

Jumlah Pegawai posisi Bulan Desember 2020 sebanyak 105 orang yang terdiri dari : 49 orang Pegawai Organik dan 60 orang tenaga honorer/ sukarela, kondisi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Tingkat Pendidikan Pegawai

No.	Pendidikan	Organik	Non Organik		Jumlah
			Honorer	Sukarela	
1.	S2	2	-	-	2
2.	S1/D4	25	17	-	42
3.	D3	-	1	-	1
4.	SLTA	18	42	-	60
5.	SLTP	-	-	-	-
6.	SD	-	-	-	-
T o t a l		45	60	-	105

Kualifikasi Penjenjangan Struktural :

- SPAMA / PIM II : 1 orang
- SPAMA / PIM III : 1 orang
- ADUM/ PIM IV : 12 orang

- Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan :

Tabel 2.2
Kualifikasi Pegawai

No.	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	IV	2	2
2.	III	26	26
3.	II	17	17
4.	I	-	-
Jumlah		45	45

- Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural :

Tabel. 2.3
Jabatan dan Jumlah Pegawai

No.	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala Dinas	1 Orang	Eselon II
2.	Sekertaris	1 Orang	Eselon III
3.	Kepala Bidang	4 Orang	Eselon III
4.	Kepala Sub	3 Orang	Eselon IV
5.	Bagian	12Orang	Eselon IV
6.	Kepala Seksi	2 Orang	Eselon IV
Jumlah		23	

Kelengkapan

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan, Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-una memiliki kelengkapan sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Keadaan Aset Dinas Perikanan Kab. Tojo Una Una

No	Jenis Barang	Jumlah
1.	Meja Kerja	65 unit
2.	Kursi Kerja	72 unit
3.	Kendaraan Roda Dua	26 unit



No	Jenis Barang	Jumlah
4.	Kendaraan Roda Tiga	2 unit
5.	Kendaraan Roda Empat	5 unit
6.	Laptop/Note Book	17 unit
7.	Komputer	12 unit
8.	Printer	17 unit
9.	Scanner	1 unit
10.	Lemari Arsip	16 unit
11.	AC	20 unit
12.	Televisi	2 unit
13.	Filling Kabinet	2 unit
14.	Brankas	1 unit
15.	Telepon	1 unit
16.	Faksimile	1 unit
17.	Infokus	3 unit
18.	Dispenser	7 buah
19.	Kamera Digital	5 buah
20.	Kamera Underwater	1 unit
21.	All Band	1 unit
22.	Speed Boad	4 Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan

Tingkat capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una berdasarkan Renstra periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel. 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	Indikator Wajib																		
1	<u>Produksi Perikanan Budidaya</u>				5,462.64	6,008.90	6,609.79	7,270.77	7,997.85	5,554.60	5,558.70	7,348.55	7,270.80	-	101.7	92.5	111.2	100.0	-
2	<u>Produksi Perikanan Tangkap</u>				11,499.18	12,649.10	13,914.01	15,305.41	16,835.95	11,912.80	12,177.00	14,355.00	15,655.00	-	103.6	96.3	103.2	102.3	-
3	<u>Tingkat Konsumsi Ikan</u>				54.00	55.00	55.50	56.00	56.00	60.60	66.70	80.30	83.40	-	112.2	121.3	144.7	148.9	-
4	<u>Penerimaan Pendapatan Asli Daerah</u>				200,000,000	210,000,000	220,000,000	230,000,000	240,000,000	200,000,000	269,220,574	340,000,200	175,018,650	-	100.0	128.2	154.5	76.1	-
5	Luas Kawasan Pengembangan Budidaya yang terolah				250.00	270.00	300.00	330.00	370.00	250.00	270.00	300.00	330.00	-	100.0	100.0	100.0	100.0	-
6	Peningkatan fasilitas sentra perikanan tangkap				8.00	10.00	12.00	13.00	13.00	8.00	10.00	12.00	13.00	-	100.0	100.0	100.0	100.0	-
7	Jumlah Armada Penangkapan Ikan																		
	a. Motor Tempel < 3 GT				3,851	3,951	4,051	4,151	4,151	3,687	3,890	5,072	4,977	-	95.7	98.5	125.2	119.9	-
	b. Kapal Motor (3 s/d 30 GT)				24	26	28	30	30	22	50	45	44	-	91.7	192.3	160.7	146.7	-
8	Jumlah penumbuhan dan pengembangan Kelompok Usaha bersama				390.00	400.00	410.00	420.00	420.00	390	400	410	420	-	100.0	100.0	100.0	100.0	-
9	Jumlah Nelayan Penerima Manfaat				3,229	3,329	3,429	3,529	3,529	3,229	3,329	3,429	3,529	-	100.0	100.0	100.0	100.0	-
10	Jumlah Kelompok pembudidaya ikan yang diberdayakan				15	20	25	30	35	15	20	25	30	-	100.0	100.0	100.0	100.0	-
11	<u>Pendapatan nelayan</u>				12,610,000	16,393,000	21,310,900	27,704,170	27,704,170	12,610,000	16,393,000	21,310,900	27,704,170	-	100.0	100.0	100.0	100.0	-
12	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan				70.00	75.00	90.00	100.00	100.00	70.00	75.00	90.00	100.00	-	100.0	100.0	100.0	100.0	-
13	Jumlah Pengembangan Kawasan Minawisata				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.0	100.0	100.0	100.0	-
14	Persentase penyelesaian tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan				60.00	65.00	70.00	75.00	75.00	60.00	65.00	70.00	75.00	-	100.0	100.0	100.0	100.0	-
15	Tingkat keberhasilan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan				55.00	60.00	65.00	75.00	75.00	55.00	60.00	65.00	75.00	-	100.0	100.0	100.0	100.0	-
16	Jumlah anggaran pelayanan administrasi perkantoran				1,303,901,375	1,700,000,000	1,885,000,000	2,060,000,000	2,160,000,000	1,523,340,675	1,436,473,400	1,096,960,895	1,541,517,797	1,842,490,890	116.8	84.5	58.2	74.8	85.3
17	Capaian pelaksanaan program				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
18	Jumlah anggaran peningkatan kapasitas aparatur				413,186,000	655,000,000	660,000,000	670,000,000	670,000,000	311,440,000	334,085,000	308,845,000	143,633,000	-	75.4	51.0	46.8	21.4	-
19	Capaian kinerja aparatur				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
20	Peningkatan fasilitas perikanan budidaya				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0



Tabel .2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan
Kabupaten Tojo Una-una

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,523,340,675	1,436,473,000	1,096,960,895	1,541,517,797	1,494,696,100	1,427,738,763	1,084,462,250	1,538,914,640	98.12	99.39	98.86	99.83	3.73	4.46
1	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi perkantoran	76,397,175	71,854,000	69,040,890	52,873,500	76,120,400	71,853,900	68,348,600	52,778,400	99.64	100.00	99.00	99.82	(11.09)	(11.09)
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	644,142,500	666,264,000	612,000,000	1,159,874,503	615,774,762	657,530,363	600,193,650	1,157,367,040	95.60	98.69	98.07	99.78	28.27	30.30
3	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	527,136,000	488,695,000	245,860,000	104,639,750	527,135,988	488,694,500	245,860,000	104,639,200	100.00	100.00	100.00	100.00	(38.14)	(38.14)
4	Kegiatan Koordinasi dan pembinaan dalam daerah	275,665,000	209,660,000	170,060,005	224,130,044	275,664,950	209,660,000	170,060,000	224,130,000	100.00	100.00	100.00	100.00	(3.68)	(3.68)
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	628,450,000	249,930,000	281,002,104	237,210,000	654,059,496	249,215,800	280,345,400	163,127,250	104.08	99.71	99.77	68.77	(21.13)	(30.41)
1	Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	231,700,000	46,680,000	10,204,136	96,705,000	259,504,748	46,372,000	10,195,500	23,449,500	112.00	99.34	99.92	24.25	229.90	(10.05)
2	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	261,700,000	172,150,000	255,397,968	96,705,000	259,504,748	171,803,800	254,759,900	95,907,750	99.16	99.80	99.75	99.18	(16.00)	(15.95)
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	135,050,000	31,100,000	15,400,000	43,800,000	135,050,000	31,040,000	15,390,000	43,770,000	100.00	99.81	99.94	99.93	18.99	18.99
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	311,440,000	334,085,000	308,845,000	143,633,000	307,948,901	329,580,500	308,844,000	140,622,400	98.88	98.65	100.00	97.90	(17.93)	(17.91)
1	Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	-	-	102,075,000	72,653,000	-	102,075,000	-	72,652,400	-	-	100.00	100.00	-	-
2	Kegiatan penguatan kelembagaan UPTD kelautan dan perikanan	311,440,000	334,085,000	206,770,000	70,980,000	307,948,901	329,580,500	206,769,000	67,970,000	98.88	98.65	100.00	95.76	(32.17)	(32.46)
IV	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	85,185,000	-	-	-	85,185,000	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-
1	Kegiatan Monitoring dan evaluasi program	85,185,000	-	-	-	85,185,000	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-
V	Program Pemberdayaan Nelayan	3,165,268,000	2,370,599,254	3,218,648,000	928,047,000	3,159,154,000	2,368,739,900	3,212,093,990	927,687,000	99.81	99.92	99.80	99.96	(20.17)	(20.18)
1	Kegiatan Pendampingan dan pemberdayaan nelayan	3,102,729,000	2,370,599,254	3,134,548,000	922,922,000	3,099,399,000	2,368,739,900	3,128,888,990	922,602,000	99.89	99.92	99.82	99.97	(20.64)	(20.67)
2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas kelembagaan nelayan	62,539,000	-	-	-	59,755,000	-	-	-	95.55	-	-	-	-	-
3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Nelayan	-	-	84,100,000	5,125,000	-	-	83,205,000	5,085,000	-	-	98.94	99.22	-	-
VI	Program Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan	1,185,849,000	743,077,508	488,210,000	926,390,258	1,185,070,600	741,707,000	485,257,900	924,181,708	99.93	99.82	99.40	99.76	6.04	6.15
1	Kegiatan Pendampingan dan pemberdayaan pembudidaya ikan	1,121,195,000	689,485,322	488,210,000	608,050,258	1,120,506,600	688,119,000	485,257,900	605,841,708	99.94	99.80	99.40	99.64	(14.38)	(14.41)
2	Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM pembudidayaan ikan	-	53,592,186	-	66,405,000	-	53,588,000	-	66,405,000	-	99.99	-	100.00	-	-
3	Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan pembudidayaan ikan	64,654,000	-	-	53,680,000	64,564,000	-	-	53,680,000	99.86	-	-	100.00	-	-
4	Kegiatan Pengembangan produksi dan usaha budidaya	-	-	-	195,825,000	-	-	-	195,825,000	-	-	-	100.00	-	-
5	Kegiatan Pengembangan kesehatan ikan dan lingkungan	-	-	-	2,430,000	-	-	-	2,430,000	-	-	-	100.00	-	-
VII	Program Pengembangan usaha Budidaya dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	1,946,841,000	1,445,549,338	1,494,736,996	394,057,600	1,943,316,500	1,444,256,100	1,492,576,924	394,057,600	99.82	99.91	99.86	100.00	(31.99)	(31.98)
1	Kegiatan Peningkatan Operasional TPI/PPI	630,459,000	623,173,338	611,032,000	19,485,000	629,541,300	622,170,600	610,037,524	19,485,000	99.85	99.84	99.84	100.00	(33.31)	(33.31)
2	Kegiatan Peningkatan pelayanan usaha budidaya	106,398,000	-	-	-	105,997,000	-	-	-	99.62	-	-	-	-	-
3	Kegiatan Peningkatan Pengawasan perizinan	1,209,984,000	822,376,000	883,704,996	374,572,600	1,207,778,200	822,085,500	882,539,400	374,572,600	99.82	99.96	99.87	100.00	(27.40)	(27.38)
VIII	Program Pengembangan Budidaya	1,474,579,686	1,338,596,147	1,251,119,000	98,255,000	1,469,123,000	1,311,427,850	1,238,842,000	61,040,000	99.63	97.97	99.02	62.12	(35.97)	(37.11)
1	Kegiatan Pengembangan produksi dan usaha budidaya	220,034,000	303,464,000	478,716,000	-	215,626,000	277,961,350	478,105,900	-	98.00	91.60	99.87	-	(1.44)	0.30
2	Kegiatan Pengembangan kesehatan ikan dan lingkungan	69,387,800	-	32,900,000	-	69,382,000	-	32,860,000	-	99.99	-	99.88	-	-	-
3	Kegiatan pengembangan kawasan budidaya	1,185,157,886	983,946,147	133,200,000	-	1,184,115,000	982,281,000	132,158,000	-	99.91	99.83	99.22	-	(67.81)	(67.86)
4	Kegiatan Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	-	51,186,000	606,303,000	98,255,000	-	51,185,500	595,718,100	61,040,000	-	100.00	98.25	62.12	-	-



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Pada periode renstra sebelumnya, terdapat beberapa peluang dan kekuatan yang dimiliki dalam rangka pengembangan pelayanan antara lain:

- Potensi sumberdaya yang cukup besar tersedia sehingga masih memungkinkan untuk pengembangan pelayanan yang lebih baik.
- Wilayah pengembangan usaha perikanan masih belum dimanfaatkan secara maksimal.

Selain peluang dan kekuatan tersebut, terdapat pula kelemahan dalam rangka pengembangan pelayanan yaitu masih kurangnya dukungan dana dan sumberdaya manusia yang handal. Dalam menjalankan pelayanan tersebut banyak pula diperoleh tantangan yang dihadapi antara lain : cakupan wilayah yang cukup luas dan memerlukan waktu yang lama untuk mencapai suatu lokasi khususnya diwilayah kepulauan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sumberdaya yang ada secara ramah lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya kegiatan *illegal fishing* dan *destructive fishing* (penggunaan bom dan bius dalam penangkapan ikan).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una sebagai salah satu instansi teknis yang mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat pelaku kegiatan di bidang perikanan masih perlu meningkatkan kapasitas baik dari segi kelembagaan maupun sumberdaya manusia. Saat ini, tenaga teknis lapangan yang tersedia dirasakan masih sangat kurang sehingga tugas dan fungsi pembinaan dilapangan belum berjalan secara maksimal. Peningkatan kemampuan baik secara kelembagaan maupun sumberdaya manusia, tentu saja harus didukung oleh ketersediaan dana yang memadai sehingga apa yang menjadi *grand strategy* dan telah direncanakan dalam rencana aksi dapat terwujud.

Dengan demikian diharapkan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan yang rata-rata tingkat kehidupannya masih berada dibawah garis kemiskinan akan dapat menikmati pelayanan dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan usaha perikanan (penangkapan dan budidaya) dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatannya.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah pada Perangkat Daerah Dinas Perikanan
Kabupaten Tojo Una-Una Periode 2021-2026

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya Akuntabilitas Kinerja dan pengelolaan Keuangan Dinas Perikanan	Masih rendahnya Akuntabilitas kinerja urusan penunjang pemerintahan	Kualitas dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas Perikanan masih rendah
			Maasih rendahnya Capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan
			Belum optimalnya pengelolaan pengelolaan keuangan



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			belum optimalnya tatakelola barang milik daerah sesuai dengan SAP
			Masih rendahnya kinerja ASN Dinas Perikanan
			pelayanan administrasi di Dinas Perikanan belum optimal
			belum optimalnya penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Peningkatan pelayanan dalam menunjang urusan Dinas Perikanan
			pemeliharaan aset Dinas Perikanan belum optimal
2	Derajat hidup masyarakat perikanan dan Kontribusi sektor Perikanan dalam memajukan perekonomian Daerah belum optimal	Belum optimalnya pengelolaan Perikanan Tangkap dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian daerah.	Belum optimalnya Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
			Belum optimalnya penjaminan ketersediaan Sarana usaha Perikanan Tangkap
			Belum optimalnya Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil belum optimal
			Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			belum memadai
		Belum optimalnya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Belum optimalnya Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan belum memadai
			Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan perlindungan Lahan untuk pembudidayaan ikan masih kurang
		Belum optimalnya Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Belum optimal pengawasan sumberdaya perikanan tangkap
		Belum optimalnya Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kurangnya Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
			Kurangnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan belum memadai

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam rangka menindak lanjuti visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-una memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kegiatan agrobisnis di bidang Perikanan yang dilaksanakan secara merata, mandiri dan



berkelanjutan. Untuk mendukung Misi 1 dan 3 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu misi 1 ***Mewujudkan masyarakat yang terentaskan dari kemiskinan, tangguh bencana, dan lingkungan berkelanjutan, Misi 3 memantapkan trisula pembangunan ekonomi bertumpu pada sektor pertanian, perikanan-kelautan, dan pariwisata yang berkelanjutan***, maka Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-una akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam program sebagai berikut:

- Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pengelolaan perikanan tangkap
- Program Pengelolaan perikanan Budidaya
- Program Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Dinas Perikanan yang berkaitan dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut serta masalah yang dihadapi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat tentu saja terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong, yaitu :

1. Faktor Penghambat :

- a) Lemahnya SDM khususnya masyarakat nelayan/pembudidaya ikan serta kurangnya tenaga teknis pendamping kegiatan dilapangan.
- b) Kurang kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan potensi sumberdaya yang ramah lingkungan.
- c) Tingginya kegiatan *illegal fishing* dan *destructive fishing*.
- d) Kurangnya sarana prasarana perikanan tangkap dan pembudidaya ikan.

2. Faktor Pendorong :

- a) Potensi Perikanan yang dimiliki masih sangat besar.
- b) Dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi.



- c) Program peningkatan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintahan saat ini.
- d) Usaha Perikanan yang dilakukan secara umum masih bersifat tradisional sehingga upaya pengembangan masih memungkinkan untuk dilakukan.



Tabel 3.2

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi: TERWUJUDNYA KABUPATEN TOJO UNA-UNA TANGGUH, MAJU, DAN SEJAHTERA (TAMARA)				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang terentaskan dari kemiskinan, tangguh bencana, dan lingkungan berkelanjutan Misi 3 : memantapkan trisula pembangunan ekonomi bertumpu pada sektor pertanian, perikanan-kelautan, dan pariwisata yang berkelanjutan				
1	Program Pengelolaan perikanan tangkap	Masih rendahnya pendapatan masyarakat nelayan	Sarana prasarana yang belum memadai dan Kemampuan masyarakat nelayan dalam manajemen keuangan masih rendah	pendampingan dan pemberdayaan nelayan
2	Program Pengelolaan perikanan budidaya	Produksi budidaya belum maksimal	Lemahnya SDM Pembudidaya Ikan	Pendampingan dan pemberdayaan pembudidaya ikan
3	Program Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Tingginya kegiatan <i>illegal fishing dan destructive fishing</i>	Infrastruktur belum memadai	Dukungan pemerintah pusat dan provinsi untuk sarana dan prasarana
4	Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Belum maksimalnya pengelolaan komoditas unggulan	Sarana dan prasarana belum memadai	Dukungan pemerintah pusat dan provinsi untuk sarana

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2021

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Telaahan terhadap Renstra K/L dan Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi perlu dilakukan untuk menilai sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sarana Renstra OPD.

Tabel 3.3.
Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	PDB Perikanan (%) Produksi perikanan (ton) a) Perikanan tangkap b) Perikanan budidaya Produksi garam rakyat (juta ton) NTN/NTPi (%) Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar) Konsumsi ikan (kg/kap/th) Jumlah pulau-pulau kecil yang dikelola (pulau) Luas kawasan konservasi perairan (ha) Wilayah perairan bebas <i>IUU fishing</i> (%) Jumlah kasus penolakan ekspor per Negara mitra (kasus) Jumlah hasil litbang yang inovatif (hasil litbang) Rasio jumlah peserta yang dididik, dilatih dan disuluh yang kompeten di bidang KP (%)	a) Kualitas SDM Aparatur yang masih relatif rendah	a) Kurangnya ketersediaan SDM Aparatur yang kompeten b) Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan SDKP c) Masih ada pelaksanaa n kerja yang belum memiliki SOP / Instruksi Kerja serta manajemen resiko d) keterbatasan sarana prasarana	a) Adanya payung hukum yang jelas terhadap tupoksi untuk pelayanan umum; b) Peluang untuk sertifikasi ISO 9001:2015 c) Sebagian besar sarana dan prasarana telah ada hanya memerlukan pemeliharaaa n
		b) Infrastruktur dasar yang masih kurang terutama di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil c) Sistem pendataan dan akses informasi yang belum optimal	a) Luasan dan kontur wilayah Sulawesi Tengah yang beragam b) Ketersediaan data dan informasi yang belum akurat c) pemahaman tentang pentingnya data yang	a) Komitmen pemerintah terkait pembiayaan dan kemajuan sektor kelautan dan pemerintah b) Kuantitas SDM Kelautan dan Perikanan yang memadai untuk diberdayakan



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>masih kurang</p> <p>d) Kualitas kuantitas Pengelola informasi relatif lemah</p> <p>e) Keterbatasan sarana prasarana pengolahan informasi data dan perikanan</p>	
		<p>d) Kualitas SDM Pelaku Usaha Perikanan masih relatif rendah</p> <p>e) Belum optimalnya kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan</p> <p>f) Masih kurangnya akses permodalan pelaku usaha perikanan</p>	<p>a) Rendahnya tingkat pendidikan SDM usaha perikanan</p> <p>b) Kemampuan kapasitas kelembagaan pelaku masih terbatas</p> <p>c) Masih kurangnya kepercayaan dunia perbankan pada perikanan</p> <p>d) Prosedur perbankan yang dipenuhi pelaku perikanan skala kecil</p> <p>e) Tingkat bunga yang relatif tinggi</p>	<p>a) Keinginan pelaku usaha untuk meningkatkan taraf hidup</p> <p>b) Adanya kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kemampuan pelaku usaha yang oleh OPD</p> <p>c) Mulai banyaknya inovasi teknologi dilakukan bidang kelautan perikanan melibatkan perbankan</p>
		<p>g) Belum optimalnya sarana dan prasarana kelautan dan perikanan</p> <p>h) Masih sederhananya teknologi yang diterapkan</p> <p>i) Terbatasnya ketersediaan induk unggul, benih bermutu dan pakan murah berkualitas</p>	<p>a) Sarana prasarana yang ada masih terbatas dan sebagian besar yang telah ada masih konvensional</p> <p>b) Kualitas SDM Kelautan Perikanan yang relatif rendah</p>	<p>a) Komitmen pemerintah terkait pembiayaan dan kemajuan sektor kelautan dan pemerintah</p> <p>b) Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar</p>



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra	Permasalahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		i) Rendahnya daya saing produk perikanan k) Belum optimalnya pemanfaatan pasar di dalam dan luar negeri l) Belum optimalnya pemanfaatan potensi kelautan dan m) Terjadinya konflik kepentingan dengan pengguna lain n) Kemampuan kelembagaan perikanan yang masih terbatas o) Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pengendalian sumberdaya kelautan perikanan p) Penegakan hukum masih belum efektif efisien q) Belum optimalnya masyarakat dalam mengelola kawasan perairan	c) Sebagian pakan didatangkan dari luar d) Industri penyediaan bahan pakan masih terbatas e) Mahalnya pakan mengakibatkan ongkos produksi besar f) Sistem ikan tertata baik efisien g) Sistem perijinan belum dan efisien h) Kurangnya sarana prasarana penegak hukum di laut i) Mahalnya biaya pengawas j) Maraknya kegiatan <i>Unreported Unregulated Fishing (IUU)</i>	c) Peningkatan mutu dan jaminan keamanan pangan d) Optimalisasi pemberdayaan petugas pengawas sumberdaya ikan di laut e) Penataan wilayah sistem logistik ikan f) Pelayanan perijinan satu pintu dan terpadu yang mulai dilakukan oleh pemerintah g) pengendalian pemanfaatan ekosistem laut, perairan umum dan sumberdaya ikan h) Rekstrukturisasi sarana prasarana dan pengembangan teknologi i) Telah terbangunnya kesadaran dan motivasi akan pentingnya hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak j) Telah tersusunnya Perda tentang Rencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) k) Penguatan regulasi dan kebijakan



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2011-2031 rencana pola ruang wilayah Kabupaten Tojo Una Una meliputi :

- a. Kawasan hutan lindung seluas \pm 187.839 Ha.
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya seluas \pm 381.523 Ha.
- c. Kawasan Perlindungan setempat meliputi :

✓ Sempadan pantai

Kawasan sempadan pantai meliputi kawasan daratan sepanjang tepian pantai yang berfungsi untuk melestarikan fungsi pantai dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, seluas \pm 13.147,24 Ha meliputi kecamatan Tojo, Tojo Barat, Ulubongka, Ampana Kota, Ampana Tete, Una Una, Togean, Walea Besar dan Walea Kepulauan.

✓ Sempadan sungai

Kawasan sempadan sungai berupa sempadan berjarak 5 meter dari kaki tanggul sebelahluar pada sungai bertanggul, 100 meter dari tepi pada sungai besar tidak bertanggul, dan 50 meter dari tepi pada sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman; seluas kurang lebih 37.960, 79 Ha (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh koma tujuh puluh sembilan hektar), meliputi kecamatan Tojo, Tojo Barat, Ulubongka, Ampana Kota, Ampana Tete, Una Una, Togean, Walea Besar dan Walea Kepulauan.

✓ Kawasan sekitar danau atau waduk

Kawasan sekitar danau atau waduk berupa kawasan sepanjang perairan dengan jarak 500 meter dari tepi waduk atau danau pada perlindungan sekitar mikrohidro seluas 44.819 Ha (empat puluh empat ribu delapan ratus sembilan belas hektar) meliputi : Sungai Betaua Kecamatan Tojo; Sungai Bongka Kecamatan Ulubongka; Sungai

Balanggala, Sungai Sabo, Sungai Padauloyo di Kecamatan Ampana Tete; dan Sungai Ue Podimaoti dan Sungai Ue Ampana di Kecamatan Ampana Kota.

✓ Kawasan sekitar mata air;

Kawasan sekitar mata air berupa kawasan dengan jarak 200 meter sekeliling mata air di luar kawasan permukiman dan 100 meter sekeliling mata air di dalam kawasan permukiman.

✓ Ruang terbuka hijau perkotaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf e, ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan, meliputi: Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yaitu taman kota, taman pemakaman umum dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai dan pantai dengan proporsi paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat yaitu kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan, dengan proporsi 10% (sepuluh persen).

Selain itu, RTRW Kabupaten Tojo Una Una juga telah mengatur tentang kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dan kawasan peruntukan perikanan untuk kegiatan perikanan tangkap, budidaya perikanan dan kawasan peruntukan kawasan pengolahan ikan serta kawasan pengembangan minapolitan.

Tabel 3.4.

Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kawasan peruntukkan perikanan	Lingkungan pengembangan perikanan tercemar	Kawasan pengembangan perikanan berada pada kawasan industri	Mendorong program pengolahan limbah
2.	Kawasan pesisir dan pulau-pulau	Pengembangan wilayah pesisir	Penetapan kawasan	Mendorong pembuatan zonasi



No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	kecil	dan pulau kecil belum maksimal	pulau kecil sebagai taman wisata	pengembangan pulau-pulau kecil
3.	Pengembangan kawasan minapolitan	Pengembangan kawasan minapolitan belum maksimal	Penetapan kawasan minapolitan tidak fokus pada suatu wilayah	Kegiatan pengembangan minapolitan fokus di wilayah kepulauan

Tabel 3.5.
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
1	2	3	4	5	6
1.	Penentuan zonasi tata ruang dalam kawasan pesisir dan pengembangan sektor unggulan di kawasan pesisir dan laut di wilayah kabupaten meliputi kawasan pesisir kabupaten Tojo Una Una	Penentuan zonasi tata ruang untuk kawasan perikanan dan pengembangan pesisir dan pulau-pulau kecil telah diperdayakan.	Pemantapan, peningkatan dan pengembangan sektor unggulan di kawasan pesisir dan laut.	Kawasan pesisir merupakan kawasan yang memiliki potensi komoditi sektor unggulan di kawasan pesisir dan laut	Sepanjang pesisir Kabupaten Tojo Una Una
2.	Kawasan Minapolitan ditetapkan di wilayah Kepulauan.	Kawasan Peruntukkan Perikanan berupa Kawasan minapolitan meliputi : a. Kecamatan Ulubongka, b. Kecamatan Tojo, c. Kecamatan Tojo Barat, d. Kecamatan Una-Una, e. Kecamatan Togean, f. Kecamatan Walea Kepulauan dan g. Kecamatan Walea Besar h. Kecamatan Ampana kota i. Kecamatan Ampana Tete j. Kecamatan Batudaka k. Kecamatan Talatako l. Kecamatan Ratolindo	Pemantapan dan pengembangan Kawasan Minapolitan melalui Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Minapolitan	Ketersediaan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Minapolitan Berfungsi sebagai acuan pengembangan dan konsolidasi ruang berbagai sektoral yang menunjang didalamnya agar tidak tumpang tindih.	a. Kecamatan Una-Una b. Kecamatan Togean c. Kecamatan Walea Kepulauan d. Kecamatan Walea Besar e. Kecamatan Batudaka f. Kecamatan Talatako

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una



3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Untuk menentukan isu-isu strategis maka perlu mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari gambaran pelayanan dinas, sasaran jangka menengah pada renstra K/L, sasaran jangka menengah pada renstra OPD, implikasi RTRW bagi pelayanan OPD dan implikasi KLHS bagi pelayanan OPD.

Tabel 3.6
Penentuan Isu-isu Startegis

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Isu ketahanan pangan	a) Harga komoditas fluktuatif, cenderung turun, nelayan/pembudidaya ikan merugi b) Masih rendahnya minat pelau usaha budidaya untuk sertifikasi unit usahanya bagi keperluan <i>food safety</i> dan jaminan mutu c) Sempitnya lahan perairan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan usaha perikanan budidaya d) Angka kemiskinan masih relatif tinggi, terutama di kalangan nelayan di wilayah pesisir	a) Tingginya harga pakan yang berimbas terhadap tingginya ongkos produksi budidaya b) Inovasi teknologi pada usaha perikanan c) Terbatasnya ketersediaan induk unggul, benih bermutu dan pakan murah berkualitas d) Belum optimalnya sarana dan prasarana penangkapan ikan e) Terbatasnya sarana prasarana produksi f) Belum optimalnya peran dan fungsi Sentra-sentra perikanan g) Konflik kepentingan antar pengguna misalnya nelayan yang masih marak terkait pemanfaatan pengelolaan ruang laut	
2	Persaingan pasar global dan industrialisasi	a) Rendahnya daya saing produk perikanan kelautan b) Kualitas kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolah	a) Keterbatasan infrastruktur dasar b) Terbatasnya akses permodalan c) Sistem perijinan yang belum efektif dan efisien	



Melalui penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan, maka dilakukan penentuan isu-isu strategis, yakni:

1. Kualitas SDM perikanan baik aparatur maupun pelaku usaha;
2. Pengelolaan Sumberdaya Perikanan;
3. Pengawasan dan penegakan hukum.

Selanjutnya isu-isu strategis tersebut akan ditangani melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una dan diharapkan akan selesai sampai dengan Tahun 2026.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2021-2026 yang dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perumusan Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Visi Misi

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN TOJO UNA-UNA TANGGUH, MAJU, DAN SEJAHTERA (TAMARA)		
Misi	Tujuan	Sasaran
MISI PERTAMA : <i>Mewujudkan masyarakat yang terentaskan dari kemiskinan, tangguh bencana, dan lingkungan berkelanjutan</i>	1. Membuka, dan memperluas lapangan kerja di bidang dan perikanan	1. Bertambahnya kesempatan kerja di sektor perikanan
MISI KETIGA : <i>memantapkan trisula pembangunan ekonomi bertumpu pada sektor pertanian, perikanan-kelautan, dan pariwisata yang berkelanjutan</i>	1. Mengelola sumberdaya Perikanan secara berkelanjutan 2. Meningkatkan produksi perikanan yang berdaya saing 3. Menjaga kelestarian sumberdaya perikanan	1. Terwujudnya pengelolaan perikanan yang ramah lingkungan 2. Meningkatnya pendapatan masyarakat perikanan 3. Berkurangnya <i>Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing</i>

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2021

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran, maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Mengelola sumberdaya Perikanan secara berkelanjutan.
2. Membuka dan memperluas lapangan kerja di bidang perikanan.
3. Meningkatkan produksi perikanan yang berdaya saing.
4. Menjaga kelestarian sumberdaya perikanan

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Terwujudnya pengelolaan perikanan yang ramah lingkungan.
2. Bertambahnya kesempatan kerja di sektor perikanan.
3. Meningkatnya pendapatan masyarakat perikanan
4. Berkurangnya *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing*.

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, strategi dan Arah Kebijakan
Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan Administrasi, Pelayanan dan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Nilai Sakip OPD	Huruf	CC	C	BB	B	A
		Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentasi Capaian Kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan	Persen	90	92,5	95	97,5	100
2	Meningkatkan derajat hidup pelaku usaha perikanan		Nilai Tukar Nelayan	Persen	101,00	102,00	103,00	104,00	105,00
		Meningkatkan kontribusi sektor perikanan dalam memajukan perekonomian daerah	Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	Persen	11,27-11,31	11,31-11,35	11,35-11,39	11,39-11,43	11,43-11,47
		Meningkatnya produksi sektor perikanan	Persentase peningkatan produksi sektor perikanan	Persen	0,20-0,50	0,20-0,50	0,20-0,50	0,20-0,50	0,20-0,50



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una berperan dalam mewujudkan misi ke-1 dan ke-3 untuk periode tahun 2021-2026, maka strategi dan arah kebijakan dalam rencana strategis pembangunan perikanan disusun berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan yang berkembang dalam lima tahun mendatang, dapat dilihat pada Tabel 5.1 yaitu :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
Periode 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pengelolaan Administrasi, Pelayanan dan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja urusan penunjang pemerintahan	Peningkatan Capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan
			Peningkatan dokumen perencanaan dan evaluasi yang berkualitas dan tepat waktu
			Peningkatan ketersediaan administrasi keuangan Dinas Perikanan
			Peningkatan tatakelola barang milik daerah sesuai dengan SAP
			Peningkatan kinerja ASN Dinas Perikanan
			Peningkatan layanan administrasi Dinas Perikanan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Peningkatan ketersediaan BMD dalam menunjang Urusan Perencanaan dan Penelitian
			Peningkatan pelayanan dalam menunjang urusan Dinas Perikanan
			peningkatan pemeliharaan aset Dinas Perikanan
Meningkatkan derajat hidup pelaku usaha perikanan	<p>Meningkatkan kontribusi sektor perikanan dalam memajukan perekonomian daerah</p> <p>Meningkatnya produksi sektor perikanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap, Budidaya dan Pengolahan - Peningkatan SDM Aparatur dan Pembudidaya, Nelayan dan Pengolah Hasil Perikanan - Peningkatan Daya Saing dan Aspek Pasar 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Penangkapan Ikan - Pemberdayaan Nelayan Kecil - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) - Penertiban Tanda Daftar Kapal Perikanan - Penertiban Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan - Pemberdayaan dan Pengelolaan Pembudi daya Ikan Kecil - Pengawasan Sumberdaya Perikanan - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program disusun sebagai *management plant* (rencana pengelolaan) dari upaya mewujudkan visi . Untuk itu langkah awal yang dilakukan adalah menyusun kebijakan operasional sebagai payung dari program dan kegiatan itu sendiri. Dengan demikian kegiatan yang disusun dapat lebih operasional sehingga Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Sasaran dapat terealisasi. Program dan kegiatan disusun dalam periode 5 (lima) tahun yang dibagi dalam program dan kegiatan tahunan sesuai dengan prioritas program itu sendiri untuk dapat mencapai visi. Adapun kebijakan sebagaimana tertuang dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan terdiri atas : 4 (empat) Program dan 11 (sebelas) kegiatan utama serta 1 (satu) program dan 5 (lima) kegiatan penunjang yang secara lengkap dapat dilihat dalam lampiran Dokumen Renstra-OPD ini.

6.1 Urusan Perikanan

Dengan Arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Mengelola sumber daya perikanan termasuk membangun sistem pengendalian dan pengawasan.
- b. Mengendalikan pencemaran.
- c. Menjalin kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan teluk tomini.
- d. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan peraturan-perundangan.
- e. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau air tawar dan pembudidayaan ikan serta pengembangan pemanfaatan sumber daya perairan umum.
- f. Percepatan pengembangan usaha perikanan yang maju dan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang memadai.

Arah kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program Indikatif :**

1. Program Pengelolaan perikanan tangkap.



Tujuan : Mengelola sumberdaya perikanan secara berkelanjutan dan meningkatkan produksi perikanan yang berdaya saing.

Sasaran : Terwujudnya pengelolaan perikanan yang ramah lingkungan serta meningkatnya pendapatan masyarakat perikanan.

Kegiatan :

1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
2. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota.
3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

2. Program Pengelolaan perikanan budidaya .

Tujuan : Mengelola sumberdaya perikanan secara berkelanjutan dan meningkatkan produksi perikanan yang berdaya saing.

Sasaran : Terwujudnya pengelolaan perikanan yang ramah lingkungan serta meningkatnya pendapatan masyarakat perikanan.

Kegiatan :

1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil.
3. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota..
4. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

3. Program Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Tujuan : Mengelola sumberdaya perikanan secara berkelanjutan dan meningkatkan produksi perikanan yang berdaya saing serta menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.

Sasaran : Terwujudnya pengelolaan perikanan yang ramah lingkungan dan meningkatnya pendapatan masyarakat perikanan serta berkurangnya ilegal, unreported, unregulated (IUU) fishing.

Kegiatan :

1. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota.

4. Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Tujuan : Mengelola sumberdaya perikanan secara berkelanjutan serta meningkatkan produksi perikanan yang berdaya saing.

Sasaran : Terwujudnya pengelolaan perikanan yang ramah lingkungan serta meningkatnya pendapatan masyarakat perikanan.

Kegiatan :

1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil.
2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.
3. Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

5. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Tujuan : Menyediakan fasilitas penunjang administrasi pelayanan.

Sasaran : Terselenggaranya kegiatan administrasi pelayanan.

Kegiatan :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
3. Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah.
4. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.
5. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una Periode 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formul a Perhitu ngan	Kond isi Awal (2020)	Target Dan Anggaran										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2026)		Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	
Meningkatk an kualitas pengelolaan Adminstras, Pelayanan dan Fasilitasi Penyelengga raan Pemerintah n Daerah	Meningkatny a kualitas Perencanaan dan Penganggara n SKPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD		CC	B	5.863.1 53.462	B	1.016.3 20.000	BB	982.27 0.000	BB	1.037.9 60.000	BB-A	1.048.7 90.000	BB-A	15.957. 988.582	Touna
		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluas Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja			6 Doku men		6 Doku men		6 Doku men		6 Doku men		6 Doku men		6 Doku men		Touna
		Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersedianya Renstra, Renja dan RKA			2 doku men		2 doku men		2 doku men		2 doku men		2 doku men		2 doku men		Touna
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LAKIP, LPPD, LKPJ dan LKPD			4 doku men		4 doku men		4 doku men		4 doku men		4 doku men		4 doku men		Touna
		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan gaji dan tunjangan		14 bulan	14 Bulan	4.227.0 89.880	14 Bulan	-	14 Bulan	-	14 Bulan	-	14 Bulan	-	14 Bula n	8.394.0 94.110	Touna
		Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	"Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN"		49 orang	49 orang	4.227.0 89.880	49 orang		49 orang		49 orang		49 orang		49 oran g	8.394.0 94.110	Touna
		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan kepegawaian perangkat daerah															Touna



Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formul a Perhitu ngan	Kond isi Awal (2020)	Target Dan Anggaran										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2026)		Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	
		Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT Kepemimpinan					1 orang		1 orang		1 orang		1 orang		4 oran g		Touna
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan layanan administrasi		12 bulan	12 bulan	327.06 2.710	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bula n	748.498 .895	Touna
		Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	"Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan"		2 unit	2 unit	740.00 0	2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit	10.639. 350	Touna
		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"		1 unit	1 unit	425.00 0	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit	425.000	Touna
		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	"Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan"		1 unit	1 unit	2.238.1 25	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit	3.981.2 50	Touna
		Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	"Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan"		45 jenis	45 jenis	92.231. 250	45 jenis		45 jenis		45 jenis		45 jenis		45 jenis	200.180 .007	Touna
		Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	"Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan"		25 meter	25 meter	1.000.0 00	25 meter		25 meter		25 meter		25 meter		25 mete r	1.500.0 00	Touna
		Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		2 media	2 media	2.400.0 00	2 media		2 media		2 media		2 media		2 medi a	3.960.0 00	Touna
		Sub Kegiatan : Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD"		43 kali	43 kali	228.02 8.335	43 kali		43 kali		43 kali		43 kali		43 kali	527.813 .288	Touna



Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formul a Perhitu ngan	Kond isi Awal (2020)	Target Dan Anggaran										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2026)		Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	
		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		3 jenis	3 jenis	-	3 jenis	-	3 jenis	-	3 jenis	-	3 jenis	-	3 jenis	118.012 .500	Touna
		Sub Kegiatan : Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	"Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan"		6 unit	6 unit	-	6 unit		6 unit		6 unit		6 unit		6 unit	118.012 .500	Touna
		Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	Luas gedung kantor atau bangunan yang dibangun			M2		M2		M2		M2		M2		M2		Touna
		Kegiatan : Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		12 bulan	12 bulan	1.243.2 90.872	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bula n	2.453.5 75.577	Touna
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat"		25 paket	25 paket	750.00 0	25 paket		25 paket		25 paket		25 paket		25 paket	1.250.0 00	Touna
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 bulan	12 bulan	139.68 0.872	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bula n	238.467 .237	Touna
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan"		106 orang	106 orang	1.102.8 60.000	106 orang		106 orang		106 orang		106 orang		106 oran g	2.213.8 58.340	Touna
		Kegiatan : Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		12 Bulan	12 Bulan	65.710. 000	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bula n	158.467 .500	Touna



Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formul a Perhitu ngan	Kond isi Awal (2020)	Target Dan Anggaran										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2026)		Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		35 unit	35 unit	58.000. 000	35 unit		35 unit		35 unit		35 unit		35 unit	142.207 .500	Touna
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		4 unit	4 unit	3.000.0 00	4 unit		4 unit		4 unit		4 unit		4 unit	6.000.0 00	Touna
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara"		35 unit	35 unit	4.710.0 00	35 unit		35 unit		35 unit		35 unit		35 unit	10.260. 000	Touna
Meningkatk an derajat hidup pelaku usaha perikanan	Meningkatka n kontribusi sektor perikanan dalam memajukan perekonomia n daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP (TON)	DATA STATIS TIK PERIKA NAN TANGK AP	1565 5	1625 5	65.000. 000	1660 5	1.686.1 70.000	1695 5	1.629.6 70.000	1730 5	1.722.0 80.000	1765 5	1.740.0 30.000	1765 5	10.408. 986.456	Touna
	Meningkatny a produksi sektor perikanan	KEGIATAN : PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA. DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	tersedianya layanan pengelolaan penangkapan ikan		12 Bulan	12 Bulan	65.000. 000	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bula n	2.764.7 91.000	Touna



Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formul a Perhitu ngan	Kond isi Awal (2020)	Target Dan Anggaran										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2026)		Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	
		SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBERDAYA IKAN	"Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia"		1 doku men	1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men	17.398. 000	Touna
		SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP	"Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia"		20 unit	20 unit	65.000. 000	20 unit		20 unit		20 unit		20 unit		20 unit	2.747.3 93.000	Touna
		KEGIATAN : PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	tersedianya layanan pemberdayaan nelayan kecil		12 bulan	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bula n	781.115 .456	Touna
		SUB KEGIATAN : PENGEMBANGAN KAPASITAS NELAYAN KECIL	"Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya"			50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 oran g	111.115 .456	Touna
		SUB KEGIATAN : PELAKSANAAN FASILITASI BANTUAN PENDANAAN, BANTUAN PEMBIAYAAN, KEMITRAAN USAHA	"Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya"			1 kelom pok		1 kelom pok		1 kelom pok		1 kelom pok		1 kelom pok		1 kelo mpok	670.000 .000	Touna
		KEGIATAN : PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)	tersedianya layanan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI			12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bula n	85.130. 000	Touna
		SUB KEGIATAN : PENETAPAN PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		1 doku men	1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men	35.200. 000	Touna



Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formul a Perhitu ngan	Kond isi Awal (2020)	Target Dan Anggaran										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2026)		Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	
		SUB KEGIATAN ; PELAYANAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bula n	49.930. 000	Touna
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (TON)	DATA STATIS TIK PERIKA NAN BUDID AYA	7270, 8	7870, 8	65.000. 000	8220, 8	975.34 0.000	8570, 8	942.66 0.000	8920, 8	996.11 0.000	9270, 8	1.006.5 00.000	9270 ,8	5.248.4 85.641	Touna
		KEGIATAN : PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG USAHANYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya layanan penerbitan izin usaha perikanan		12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bula n	7.760.0 00	Touna
		SUB KEGIATAN : PELAYANAN PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN USAHA PERIKANAN BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG USAHANYA, LOKASI, DAN/ATAU MANFAAT ATAU DAMPAK NEGATIFNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MENGGUNAKAN TEKNOLOGI SEDERHANA , SEMI INTENSIF, DAN INTENSIF SERTA	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta													0	7.760.0 00	Touna



Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formul a Perhitu ngan	Kond isi Awal (2020)	Target Dan Anggaran										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2026)		Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	
		TIDAK MENGGUNAKAN MODAL ASING DAN /ATAU TENAGA KERJA ASING	Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan															
		Kegiatan : Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Tersedianya layanan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil		12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bula n	3.820.0 00	Touna
		Sub Kegiatan : Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan													0	3.820.0 00	Touna
		Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Tersedianya layanan penerbitan TDPIK		12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan		12 Bula n	26.700. 000	Touna
		Sub Kegiatan : Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota													0	26.700. 000	Touna
		Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Tersedianya layanan pengelolaan pembudidayaan ikan		12 Bulan	12 Bulan	65.000. 000	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bula n	1.289.5 95.641	Touna



Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formul a Perhitu ngan	Kond isi Awal (2020)	Target Dan Anggaran										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2026)		Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 doku men	1 doku men	15.800. 000	1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men	39.765. 000	Touna
		Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	"Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota"			2 paket		2 paket		2 paket		2 paket		2 paket		2 paket	946.600 .000	Touna
		Sub Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1 paket	49.200. 000	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket	226.426 .641	Touna
		Sub Kegiatan : Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan			1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket	35.340. 000	Touna
		Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	"Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat"													0	31.224. 000	Touna



Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formul a Perhitu ngan	Kond isi Awal (2020)	Target Dan Anggaran										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2026)		Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	
		Sub Kegiatan : Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi													0	-	Touna
		Sub Kegiatan ; Perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat													0	10.240. 000	Touna
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN		NA	2,99	35.000. 000	2,9	-	2,82	-	2,74	-	2,67	-	2,67	672.643 .000	Touna
		Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota	tersedianya pengawasan sumberdaya perikanan				35.000. 000		-		-		-		-	0	672.643 .000	Touna
		Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	"Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan		12 Keca mata n	12 Keca mata n	35.000. 000	12 Keca mata n		12 Keca mata n		12 Keca mata n		12 Keca mata n		12 Keca mata n	672.643 .000	Touna



Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formul a Perhitu ngan	Kond isi Awal (2020)	Target Dan Anggaran										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2026)		Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	
			dalam Kabupaten/Kota"															
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PERSENTASE USAHA PENGOLAHAN YANG DIFASILITASI		0,00 %	10%	35.000. 000	15%	223.57 0.000	20%	216.08 0.000	25%	228.33 0.000	30%	230.71 0.000	0,3	1.065.2 78.813	Touna
		Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Tersedianya layanan penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil		12 bulan		-		-		-		-		-	0	21.640. 000	Touna
		Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	"Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko"		1 doku men		-									0	21.640. 000	Touna
		Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Tersedianya layanan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan		12 Bulan		35.000. 000		-		-		-		-	0	124.973 .813	Touna
		Sub Kegiatan : Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan				35.000. 000									0	124.973 .813	Touna



Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formul a Perhitu ngan	Kond isi Awal (2020)	Target Dan Anggaran										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2026)		Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	
			Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko															
		Kegiatan : Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya layanan penyediaan bahan baku industri pengolahan ikan		12 bulan		-		-		-		-		-	0	19.975.000	Touna
		Sub Kegiatan : Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				-									0	-	Touna
		Sub Kegiatan : Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				-									0	19.975.000	Touna

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD periode 2021-2026 ditampilkan dalam Tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	98-100	100-102	100-102	102-105	105-107	107-109	107-109
2	Pertumbuhan Ekonomi	1-2	2-3	3-4	4-5	5-7	5-7	5-7
3	Nilai Kontribusi sektor Perikanan Kelautan dalam PDRB	11,23-11,27	11,27-11,31	11,31-11,35	11,35-11,39	11,39-11,43	11,43-11,47	11,43-11,47
4	Produksi Perikanan (ton)	100-200	100-200	100-200	100-200	100-200	100-200	100-200
5	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita)	80-90	80-90	80-90	80-90	80-90	80-90	80-90
6	Cakupan Bina kelompok nelayan (%)	11-12	11-12	11-12	11-12	11-12	11-12	11-12
7	Nilai Sakip OPD	CC	CC	C	BB	B	A	A
8	Persentase Capaian Kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan	NA	90	92,5	95	97,5	100	100

Dengan adanya tolak ukur indikator diatas diharapkan sasaran tujuan yang akan dicapai dapat terukur sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut merupakan gambaran secara umum dari target setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una untuk lima tahun kedepan.

A. Produksi Perikanan

Produksi perikanan merupakan indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una yang merupakan prioritas utama. Diharapkan terjadi peningkatan produksi setiap tahunnya, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat perikanan secara umum.

B. Cakupan Binaan Kelompok Nelayan dan Pembudidaya

Salah satu indikator keberhasilan yang akan dijadikan tolak ukur adalah jumlah kelompok nelayan dan pembudidaya yang menjadi binaan Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una yang merupakan *stakeholder* pelaku usaha Perikanan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan akan difokuskan pada pembinaan kelompok nelayan dan pembudidaya dan diharapkan jumlahnya akan terus bertambah sehingga usaha perikanan yang dilaksanakan benar-benar dapat lebih profesional.

C. Tingkat Rasio Konsumsi Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI saat ini sedang menggiatkan program Gemar Makan Ikan (Gemarikan) yang bertujuan untuk peningkatan konsumsi ikan masyarakat. Secara umum, konsumsi ikan di Kabupaten Tojo Una Una telah berada di kisaran rata-rata nasional yaitu kurang lebih 42 kg/kapita/tahun. Namun secara perlahan akan terus ditingkatkan mengingat banyaknya manfaat yang diperoleh dari mengkonsumsi ikan.

D. Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan

Salah satu kendala yang dihadapi saat ini adalah masih kurangnya sarana dan prasarana Perikanan. Untuk itu pada rencana strategis lima tahunan ini, Dinas Perikanan Tojo Una Una melalui program dan kegiatan yang telah dibuat akan terus membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana perikanan. Yang menjadi target antara lain pasar ikan, tempat pelelangan ikan, sarana dan prasarana budidaya, sarana dan prasarana penangkapan ikan, sarana dan prasarana pengolahan ikan seperti pabrik es dan coolroom serta pengembangan kawasan minawisata. Khusus untuk

Pabrik Es, Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una telah merencanakan penambahan pabrik es minimal di setiap ibukota Kecamatan yang ada di Kabupaten Tojo Una Una.

E. Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan

Peningkatan usaha pelayanan usaha yang akan ditingkatkan dalam hal kemudahan pemberian legalitas usaha dalam bentuk izin usaha perikanan maupun surat izin kapal penangkap ikan serta jenis izin lainnya. Kemudahan yang diberikan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan serta untuk memberikan iklim berusaha yang kondusif sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

F. Jumlah Armada Penangkap Ikan

Dalam rangka mendukung program peningkatan produksi perikanan tangkap, Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una akan melakukan revitalisasi dan restrukturisasi armada penangkap ikan dengan strategi secara bertahap akan mengurangi armada penangkap ikan tanpa motor dan digantikan dengan armada penangkap ikan bermotor. Dengan demikian hasil tangkapan dapat meningkat.

G. Tingkat Pelanggaran Undang Undang Perikanan

Secara geografis Kabupaten Tojo Una Una memiliki gugusan kepulauan dengan potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Namun dalam pemanfaatannya belum memperhatikan kaidah-kaidah dan aturan yang berlaku. Saat ini, tingkat pelanggaran *illegal fishing* dan *destructive fishing* dengan menggunakan bom, bius serta jenis bahan yang dilarang lainnya masih sangat tinggi. Untuk itu, secara bertahap Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una akan mengintensifkan program dan kegiatan dalam rangka memberantas para pelaku *illegal fishing* dan *destructive fishing* tersebut.



H. Pemanfaatan dan Pengoperasian Fasilitas Perikanan

Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una juga akan melakukan upaya-upaya nyata dalam rangka memanfaatkan fasilitas yang telah dimiliki. Saat ini, fasilitas penunjang yang dimiliki antara lain Tempat Pelelangan Ikan, Balai Benih Ikan dan sarana lainnya. Dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan diharapkan fasilitas-fasilitas yang telah ada dapat beroperasi 100% pada tahun 2021. Dengan demikian maka hasil pembangunan perikanan dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan dapat tercapai yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan.



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Dinas Perikanan maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2021-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi kepala daerah periode Tahun 2021-2026 yaitu :

**” TERWUJUDNYA KABUPATEN TOJO UNA-UNA
TANGGUH, MAJU, DAN SEJAHTERA (TAMARA)
”**

Ampana, November 2021

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Tojo Una Una

RAHMAT BASRI, S.Pi., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19690902 199903 1 007

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR: 523/183.5/Diskan/2021

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 dengan menetapkan dalam Keputusan Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemba-ngunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Pemutakhiran dan Validasi Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor

- 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Povinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2012 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021 Nomor 5).
22. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 640/16/SJ Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

KESATU

Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:

- a. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan untuk menyusun Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026;
- b. Menyusun dokumen Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 sesuai tahapan dan tata cara yang diamanatkan dalam peraturan perundangan-undangan;
- c. Melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una;
- d. Memberikan masukan, baik kebijakan maupun substansi terhadap Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026.

KETIGA

Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tojo Una-Una.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampana
Pada tanggal September 2021

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Tojo Una Una



RAHMAT BASRI, S.Pi., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19690902 199903 1 007

LAMPIRAN – KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Nomor : 523/183.5/Diskan/2021
Tanggal : 30 September 2021
Tentang : *Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026*

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021 - 2026
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

Ketua Tim : KEPALA DINAS PERIKANAN
Sekretaris Tim : SEKRETARIS DINAS PERIKANAN
Kelompok Kerja :
1. Bidang Pemberdayaan Nelayan
Koordinator : Kepala Bidang pemberdayaan Nelayan
Anggota : Kepala Seksi Pembinaan SDM dan Kelembagaan Nelayan
2. Bidang Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan
Koordinator : Kepala Bidang Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan
Anggota : Kepala seksi perbenihan, pengembangan pembinaan SDM dan kelembagaan usaha budidaya
3. Bidang Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI
Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI
Anggota : Kepala Seksi Pembinaan TPI
4. Bidang Daya Saing Produk perikanan
Koordinator : Kepala Bidang Daya Saing Produk Perikanan
Anggota : Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan
5. Bagian Sekretariat
Koordinator : Kepala Sub Bagian Penyusun Program
Anggota : Staf Sub Bagian Penyusun Program

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal September 2021

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Tojo Una Una

RAHMAT BASRI, S.Pi., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19640902 199903 1 007